



INFO ARTHA

Journal Homepage : www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA



EFEKTIVITAS POLA ALOKASI ANGGARAN TERHADAP KEMENANGAN *INCUMBENT*

Evita Ayu Komaladewi Suyoto

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

evitaayu@yahoo.com

Vid Adrison

Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

First Received:

[17 October 2020]

Revised:

[10 December 2020]

Accepted:

[11 December 2020]

Keywords:

Pemilihan; petahana; anggaran belanja pemerintah; pemilihan kembali

ABSTRACT

Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) ran as incumbent on the next election in 2009 and obtained significant vote of 60.80 percent. This study provides new evidence of the impact of the Government's budget allocation pattern on re-election in the next election. Used a quantitative approach namely OLS regression model, this study analyzed data of 440 districts in Indonesia. This study used the election data from General Election Commission (KPU) and Tugas Pembantuan data from Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter's behaviour at district level in Indonesia during Presidential Election. Our study confirmed that government spending and previous period performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY's victory.

Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2009 dan memperoleh suara yang signifikan sebesar 60,80%. Penelitian ini memberikan bukti baru dampak pola alokasi anggaran belanja Pemerintah terhadap keterpilihan kembali pada Pemilihan Umum selanjutnya. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi OLS, penelitian ini menganalisis data 440 Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data hasil Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Keuangan untuk meneliti efektivitas pengeluaran belanja pemerintah terhadap perilaku pemilih di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia pada Pemilihan Umum. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pengeluaran belanja pemerintah dan hasil kinerja Presiden pada periode sebelumnya merupakan faktor yang mendukung kemenangan SBY sehingga terpilih kembali.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilihan kembali (*incumbent*) akan berusaha memberikan kinerja yang baik selama menjabat. Para pemilih (*voters*) akan menilai kinerja *incumbent* selama menjabat dan memutuskan untuk memberikan apresiasi (*rewards*) atau celaan (*punishment*) pada saat pemilihan selanjutnya (Mayhew, 1974). Berdasarkan perilaku *voters* tersebut, *incumbent* akan berusaha memberikan kinerja yang baik selama menjabat karena *incumbent* memiliki insentif untuk meningkatkan probabilitas keterpilihannya pada pemilihan selanjutnya (Mayhew, 1974). *Incumbent* berusaha memaksimalkan keterpilihannya dengan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah ke daerah (Veiga & Veiga, 2013) untuk melaksanakan program kerja yang telah disusunnya (Mayhew, 1974). Dengan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah ke daerah, *incumbent* berharap *voters* akan memberikan *rewards* saat pemilihan selanjutnya (Veiga & Veiga, 2013). Namun, alokasi anggaran belanja pemerintah memiliki dampak yang berbeda terhadap probabilitas keterpilihan *incumbent* di suatu wilayah (Corvalan, Cox, & Osorio, 2018). Tingkat kompetisi yang dihadapi *incumbent* di suatu wilayah dan preferensi risiko yang dimiliki *incumbent* mempengaruhi dampak alokasi anggaran belanja pemerintah terhadap probabilitas keterpilihan *incumbent* (Mayhew, 1974).

Incumbent menghadapi tingkat kompetisi yang berbeda di setiap wilayah (Corvalan et al., 2018). Tingkat kompetisi tersebut akan mempengaruhi dampak alokasi anggaran belanja pemerintah terhadap probabilitas keterpilihan *incumbent* (Mayhew, 1974). Corvalan et al., (2018) dalam studi empirisnya membedakan tingkat kompetisi yang dihadapi *incumbent* pada suatu wilayah menjadi 3 (tiga), yaitu: wilayah pendukung (*core voters*); wilayah oposisi (*opponent voters*); dan *swing voters*.

Incumbent memiliki preferensi risiko yang mempengaruhi pola alokasi anggaran belanja pemerintah ke daerah (Mayhew, 1974). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat 2 (dua) jenis preferensi risiko *incumbent*, yaitu *risk averse* (Cox & McCubbins, 1986) dan *risk lover* (Weibull & Lindbeck, 1987). Cox & McCubbins (1986) menunjukkan bahwa *incumbent* yang *risk averse* akan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah lebih tinggi kepada *core voters*. *Incumbent* berusaha untuk menyenangkan *core voters* dan berharap stabilitas suara akan terjaga.

Weibull & Lindbeck (1987) menunjukkan bahwa *incumbent* yang *risk lover* akan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah lebih tinggi pada wilayah dengan dukungan yang rendah. *Incumbent* berusaha mendapatkan peningkatan perolehan suara dari *opponent voters*. Dengan mengalokasikan anggaran

belanja pemerintah lebih tinggi pada *opponent voters*, *incumbent* menghadapi risiko penurunan perolehan suara dari *core voters*. Namun, *incumbent* berkeyakinan bahwa peningkatan perolehan suara dari *opponent voters* akan lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan perolehan suara dari *core voters*.

Voters akan memilih kandidat yang sesuai dengan ekspektasinya. Downs (1957) melakukan studi mengenai perilaku *voters* menemukan bahwa *voters* memilih kandidat yang akan memberikan *expected utility* tertinggi. Lebih lanjut Downs (1957) menjelaskan bahwa *voters* hanya dapat membangun *expected utility* karena sulit bagi *voters* untuk mengestimasi *utility* yang akan *incumbent* berikan jika terpilih kembali. Untuk membangun *expected utility*, *voters* menggunakan kinerja *incumbent* selama menjabat karena merupakan estimasi terdekat yang dapat digunakannya. Berdasarkan *utility* yang telah diterima *voters* selama *incumbent* menjabat, jika *voters* merasakan *utility* yang akan diterima lebih tinggi saat *incumbent* menang dibandingkan *incumbent* kalah, maka *voters* akan memilih *incumbent*. Jika *voters* merasakan *utility* yang akan diterima lebih tinggi saat *incumbent* kalah dibandingkan *incumbent* menang, maka *voters* akan memilih *challenger*.

Penelitian mengenai pengaruh antara anggaran belanja Pemerintah terhadap probabilitas *incumbent* terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya masih menjadi perdebatan. Tufte, (1979) menemukan bahwa pada negara dengan jumlah *low income* yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, belanja pemerintah saat *incumbent* menjabat akan meningkatkan probabilitas *incumbent* terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya. *Marginal utility* yang dirasakan oleh *low income* saat menerima alokasi belanja pemerintah akan lebih tinggi jika dibandingkan *middle income* dan *high income* (Dixit & Londregan, 1995). Penelitian sebelumnya oleh Levitt & Snyder (1997) mengenai *discretionary transfer* menemukan bahwa belanja pemerintah pada saat *incumbent* menjabat akan meningkatkan kualitas barang publik. Peningkatan kualitas barang publik tersebut akan meningkatkan probabilitas keterpilihan *incumbent* pada pemilihan selanjutnya. Veiga & Veiga (2013), Corvalan et al., (2018), Jones, Meloni, & Tommasi (2012), serta Kriner & Reeves (2012) menggunakan sampel observasi negara yang menerapkan otonomi daerah menemukan bahwa semakin besar belanja pemerintah, maka *incumbent* akan semakin populer di kalangan *voter*. Daerah otonomi tersebut memiliki pendapatan daerah yang kecil sehingga bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi *fiscal gap*-nya. Dengan semakin meningkatnya transfer belanja pemerintah pusat, maka akan meningkatkan probabilitas keterpilihan *incumbent* pada pemilihan selanjutnya.

Sebaliknya, Feldman & Jondrow (1984) menemukan bahwa pada negara maju dengan

pertumbuhan ekonomi relatif stabil, belanja pemerintah saat *incumbent* menjabat akan menurunkan probabilitas *incumbent* terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya. *Voters* pada negara maju lebih menyukai penggunaan belanja pemerintah yang efisien. Penelitian sebelumnya oleh Brender & Drazen (2008) menggunakan sample negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menemukan bahwa semakin tinggi belanja pemerintah pada saat *incumbent* menjabat, maka anggaran akan semakin berkurang bahkan defisit. *Voter* menganggap pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkualitas dan mengutamakan efisiensi anggaran. Dengan tidak efisiennya belanja pemerintah saat *incumbent* menjabat, *voter* akan memberikan *punishment* kepada *incumbent* pada pemilu selanjutnya.

Corvalan et al., (2018) berdasarkan penelitiannya mengkonfirmasi adanya *Political Budget Cycle* pada alokasi anggaran belanja Tugas Pembantuan selama 2 (dua) periode Pemerintahan SBY sebagai Presiden pada tahun 2005-2013. Penelitian ini mencoba melanjutkan penelitian Corvalan et al. (2018) untuk menganalisis dampak dari anggaran belanja pemerintah *incumbent*, yaitu "Tugas Pembantuan", yang dialokasikan kepada daerah dengan dukungan rendah pada Pemilihan Presiden sebelumnya, untuk meningkatkan probabilitas keterpilihan kembali *incumbent* pada periode selanjutnya. Pada penelitian empiris sebelumnya oleh Brender & Drazen (2008), Corvalan et al., (2018), Jones et al., (2012), Kriner & Reeves, (2012), dan Veiga & Veiga, (2013) mengkonfirmasi dampak alokasi belanja Pemerintah kepada *voters* terhadap keterpilihan Presiden kembali tanpa melihat jenis *voters* pada suatu daerah.

Pada penelitian ini penulis berusaha melihat efektivitas belanja pemerintah yang didistribusikan pada daerah dimana *incumbent* kalah di pemilihan sebelumnya, terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan berikutnya. Pengukuran probabilitas keterpilihan *incumbent* dalam penelitian ini menggunakan perolehan suara *incumbent* pada pilpres 2009. Pengukuran belanja pemerintah menggunakan rata-rata pertumbuhan alokasi TP perkapita selama *incumbent* menjabat tahun 2006-2009. Tujuan pengukuran menggunakan pertumbuhan untuk mengetahui pengaruh *marginal utility* yang dirasakan *voters* terhadap perolehan suara *incumbent*. Pengukuran secara perkapita untuk mengontrol tingginya alokasi belanja pemerintah akibat tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Penelitian sebelumnya meneliti dampak anggaran terhadap keterpilihan kembali *incumbent*. Penelitian ini mencoba menginteraksikan variabel alokasi anggaran dengan tingkat persaingan pada suatu daerah untuk menangkap dampak anggaran yang pola alokasinya berdasarkan pada tingkat persaingan yang dihadapi *incumbent* pada suatu daerah.

Peneliti menganalisis 440 (empat ratus empat puluh) Kabupaten/Kota sebagai obyek penelitian. Tugas

Pembantuan merupakan program diskresioner yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa *incumbent* dapat menggunakan program diskresioner untuk memaksimalkan probabilitas keterpilihan pada pemilihan selanjutnya (Levitt & Snyder, 1997). Alokasi belanja pemerintah untuk program TP diputuskan oleh Presiden. Anggaran belanja Pemerintah yang besar alokasinya tidak memiliki formula ini menimbulkan pertanyaan apakah *incumbent* menggunakan anggaran ini untuk meningkatkan probabilitas keterpilihan kembali pada periode berikutnya?

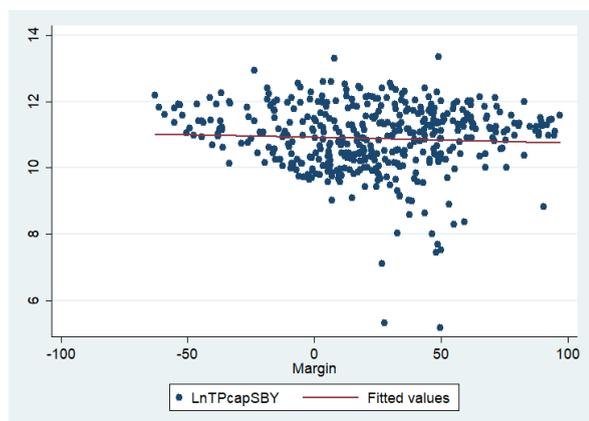
2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pemilihan Umum dan *Incumbent*

Indonesia menerapkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung sejak tahun 2004 (Ananta et al, 2005). Gonschorek, Schulze, & Sjahrir (2018) dalam studinya mengemukakan kondisi pilpres 2009. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Indonesia periode 2004-2009, mencalonkan diri kembali (*incumbent*) berpasangan dengan Boediono pada pilpres 2009 melawan Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Prabowo Subianto (Mega-Prabowo) dan Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto (JK-Wiranto). Hasil pilpres 2009 menetapkan bahwa SBY-Boediono menang dalam satu putaran dengan perolehan suara yang signifikan, yaitu sebesar 60.80%. Gonschorek et al., (2018) menunjukkan bahwa SBY meningkatkan probabilitas keterpilihannya melalui alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) ke daerah. Menurut PP no. 7 tahun 2008, pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) skema pelimpahan kewenangan pelaksanaan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Tugas Pembantuan (TP). TP merupakan *discretionary transfer* untuk penyelenggaraan infrastruktur fisik yang penetapan jumlah alokasi belanjanya merupakan kewenangan Presiden. Tujuan Pemerintah Pusat merumuskan skema Tugas Pembantuan sebagai pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah karena adanya keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat ke daerah yang menyebabkan inefisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan data alokasi anggaran TP tahun 2006-2009 dan hasil pilpres 2004 level Kab/Kota terlihat bahwa *incumbent* merupakan *risk lover*. Grafik 1 menunjukkan bahwa SBY selama menjabat memberikan alokasi belanja TP yang tinggi di Kab/Kota dimana SBY kalah pada pilpres 2004. Sedangkan, pada daerah dimana SBY menang pada pilpres 2004, SBY memberikan alokasi belanja pemerintah dengan jumlah lebih rendah.

GRAFIK 1. ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006-2009 BERDASARKAN SELISIH SUARA INCUMBENT PADA PILPRES TAHUN 2004



Sumber : Kementerian Keuangan dan KPU, diolah oleh penulis

Probabilita *incumbent* terpilih kembali dapat diukur dengan perubahan perolehan suara *incumbent* antara 2 (dua) periode pemilihan umum (Kriner & Reeves, 2012; Veiga & Veiga, 2013). Pengukuran ini dapat melihat apakah perolehan suara *incumbent* pada pemilihan selanjutnya mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan pemilihan periode sebelumnya. Pengukuran lain dengan menggunakan model binary dengan nilai 1 jika *incumbent* terpilih kembali, dan 0 jika *incumbent* tidak terpilih kembali (Brender & Drazen, 2008). Pengukuran dengan model binary dapat menangkap apakah *incumbent* menang atau kalah di suatu daerah namun tidak dapat menangkap besarnya perolehan suara *incumbent*. Pengukuran lain melalui *share* perolehan suara *incumbent* pada pemilihan umum selanjutnya (Corvalan et al., 2018; Jones et al., 2012; Levitt & Snyder, 1997). Pengukuran ini dapat menangkap apakah *incumbent* menang atau kalah di suatu daerah.

2.2 Anggaran Belanja Pemerintah

Gonschorek et al., (2018) menunjukkan bahwa SBY meningkatkan probabilita keterpilihannya melalui alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) ke daerah. Menurut PP no. 7 tahun 2008 yang ditunjukkan pada Tabel 1, Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Dana Perimbangan. Tugas Pembantuan adalah program diskresioner yang dirancang oleh Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur di Provinsi atau daerah. Program ini berada di bawah wewenang Presiden. Pemerintah Pusat merencanakan program prioritas dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan potensial daerah di Indonesia. Namun, Pemerintah Pusat memiliki sumber daya yang terbatas yang menyebabkan inefisiensi pembangunan infrastruktur di daerah. Tugas Pembantuan dirancang untuk menjadikan penyediaan

infrastruktur lebih efisien dengan mendelegasikan wewenang kepada kepala daerah. Di sisi lain, Walikota dan Bupati memiliki informasi lengkap mengenai kondisi daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

TABEL 1. SKEMA PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

	Tugas Pembantuan	Dekonsentrasi	Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH Pajak, dan DBH SDA)
Penetapan jenis program	Pemerintah Pusat	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah (DAU, DBH Pajak, dan DBH-SDA). Pemerintah Pusat (DAK)
Jenis program	Fisik	Non Fisik	Fisik dan Non Fisik
Sumber dana	APBN murni	APBN murni	APBN yang ditransfer menjadi APBD
Formula alokasi keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Tabel 2 menunjukkan jumlah perbandingan alokasi dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan TP tahun 2006 hingga 2009. Jumlah alokasi dana TP paling rendah jika dibandingkan dengan skema transfer lainnya.

TABEL 2. ALOKASI DANA DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006-2009 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2006	2007	2008	2009
Dana desentralisasi				
DBH	48.5	60.5	64	73.8
DAU	145.6	164.7	179.5	186.4
DAK	11.6	17.1	21.2	24.8
Total	205.7	242.3	264.7	285
Dana DKTP				
Dana dekonsentrasi	25	24.6	25.2	35.6
Dana Tugas Pembantuan	5.6	9.4	10.8	16.19
Total	30.6	34	36	51.79

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah kembali oleh penulis

Pada penelitian empiris sebelumnya, belanja pemerintah diukur melalui persentase perubahan belanja pemerintah perkapita pada tahun diselenggarakannya pemilu dengan tahun sebelumnya (Jones et al., 2012; Kriner & Reeves, 2012; Veiga & Veiga, 2013). Pengukuran pertumbuhan dapat menangkap peningkatan dan penurunan alokasi belanja pemerintah. Penelitian empiris lainnya menggunakan rata-rata belanja pemerintah per kapita di daerah (Levitt & Snyder, 1997; Veiga & Veiga, 2013). Pengukuran ini menangkap

banyaknya jumlah alokasi belanja pemerintah. Pengukuran pada penelitian empiris lainnya menggunakan log belanja pemerintah per kapita (Corvalan et al., 2018). Penelitian empiris sebelumnya oleh Corvalan et al. (2018); Jones et al., 2012; Kriner & Reeves (2012); Levitt & Snyder (1997); Veiga & Veiga (2013) menggunakan pengukuran secara per kapita bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk.

2.3. Partai Pendukung Kepala Daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam perolehan suara *incumbent* sangat strategis. Pemerintah Daerah lebih mengetahui kondisi politik di daerahnya serta merupakan pihak perantara yang mendistribusikan belanja pemerintah Pemerintah Pusat kepada masyarakat daerah (Corvalan et al., 2018). *Incumbent* yang memiliki keterbatasan informasi mengenai kondisi politik daerah memiliki insentif untuk memanfaatkan posisi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan suara pemilih (Stokes, Dunning, Nazanero, & Brusco, 2013; Szwarcberg, 2012). Pemerintah Daerah merupakan perwakilan dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah (Stokes et al., 2013; Szwarcberg, 2012). Posisinya yang dekat dengan *voter* memberikan keuntungan dengan dapat mengetahui preferensi politik *voter* dan kecenderungan ke pihak mana *voter* memberikan suaranya. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat memonitor perilaku *voter* di daerahnya.

Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia sejak tahun 2005 menggunakan sistem pilkada secara langsung (Gonschorek et al., 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri selama periode tahun 2005 hingga 2009 terdapat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Kab/Kota yang telah melaksanakan pilkada dari keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) Kab/Kota yang menjadi sampel penelitian. Sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Bupati/Walikota masih merupakan PNS atau ditunjuk oleh DPRD. Adanya syarat bahwa parpol hanya dapat mengajukan calon kepala daerah jika memiliki minimal 15% kursi di DPRD menyebabkan parpol dapat membentuk koalisi dengan parpol lainnya untuk dapat mencalonkan kandidat kepala daerah (Gonschorek et al., 2018). Terdapat kemungkinan koalisi tersebut terbentuk antara partai *incumbent* dengan koalisi partai oposisi. Kepala daerah yang berasal dari partai yang sama dengan *incumbent* mungkin akan berusaha memobilisasi suara *voter* kepada *incumbent*. Dan sebaliknya, kepala daerah yang berasal dari partai koalisi lawan akan berusaha memobilisasi suara *voter* kepada kandidat lawan (Corvalan et al., 2018; Veiga & Veiga, 2013).

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilpres 2009 peta politik yang terbentuk adalah *incumbent* didukung oleh Partai Demokrat (PD) berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mega-

Prabowo sebagai kandidat oposisi, didukung oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). JK-Wiranto sebagai kandidat oposisi didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana dampak dari partai pendukung kepala daerah (Bupati/Walikota) terhadap perolehan suara *incumbent*. Partai pengusung kepala daerah dapat diukur dengan dummy, dimana nilainya 1 jika berasal dari partai yang sama dengan *incumbent*, dan nilai 0 jika berasal dari partai lain (Corvalan et al., 2018; Veiga & Veiga, 2013). Namun, jika disesuaikan dengan kondisi pilkada di Indonesia, pengukuran ini tidak dapat memisahkan pengaruh parpol *incumbent* yang membentuk koalisi dengan parpol lawan *incumbent* di Kab/Kota.

2.4. Tingkat Persaingan *Incumbent*

Incumbent menghadapi tingkat kompetisi yang berbeda di setiap wilayah (Corvalan et al., 2018), yang mempengaruhi dampak alokasi anggaran belanja pemerintah terhadap probabilitas keterpilihan *incumbent* (Mayhew, 1974). Corvalan et al., (2018) dalam studi empirisnya membedakan tingkat kompetisi yang dihadapi *incumbent* pada suatu wilayah menjadi 3 (tiga), yaitu: wilayah pendukung (*core voters*); wilayah oposisi (*opponent voters*); dan *swing voters*. Tingkat kompetisi dapat diukur dengan menggunakan selisih (margin) perolehan suara *incumbent* dengan kandidat lawan (*challenger*) saat pemilihan periode sebelumnya. Jika *incumbent* memperoleh suara tinggi dengan selisih suara yang rendah pada pemilihan sebelumnya maka tingkat kompetisinya rendah. Wilayah dengan tingkat kompetisi rendah merupakan *core voters*. Dengan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah yang rendah, *incumbent* akan tetap mendapatkan dukungan dari *core voters*. Jika *incumbent* menang atau kalah dengan margin suara yang rendah pada pemilihan sebelumnya maka tingkat kompetisinya tinggi. Wilayah dengan tingkat kompetisi tinggi merupakan *swing voters*. *Swing voter* tidak memiliki preferensi politik tertentu sehingga merupakan potensi suara yang diperebutkan oleh *incumbent* dan *challenger*. *Incumbent* memerlukan alokasi anggaran belanja yang tinggi untuk dapat meyakinkan *swing voter* agar mendukungnya saat pemilihan selanjutnya. Namun, dengan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah yang tinggi kepada *swing voters*, *incumbent* memiliki risiko mengalami penurunan perolehan suara dari *core voters*.

Berdasarkan studi sebelumnya pengukuran tingkat persaingan yang dihadapi oleh *incumbent* dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu share perolehan suara *incumbent* pada pemilu sebelumnya (Jones et al., 2012) dan margin perolehan suara antara *incumbent* dengan kandidat lawan pada pemilu sebelumnya (Veiga & Veiga, 2013).

Kedua pengukuran ini dapat menangkap tingkat persaingan *incumbent* di suatu daerah.

2.5. Interaksi Alokasi Anggaran TP dan Tingkat Persaingan *Incumbent*

Incumbent menggunakan hasil perolehan suara pada pemilihan periode sebelumnya untuk menentukan besarnya anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan (Corvalan et al., 2018; Gonschorek et al., 2018). Penelitian ini menggunakan variabel interaksi antara Alokasi TP dan tingkat persaingan *incumbent* untuk melihat dampak alokasi belanja pemerintah pada perolehan suara *incumbent* berdasarkan *level of margin* pada pilpres periode sebelumnya terhadap perolehan suara *incumbent* pada pilpres periode kedua.

2.6. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi merupakan *outcome* capaian kinerja *incumbent* melalui program-program strategis. *Voter* melihat *outcome* hasil capaian kinerja *incumbent* untuk menilai kinerja *incumbent* saat menjabat (Brender & Drazen, 2008; Jones et al., 2012; Levitt & Snyder, 1997). Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa *voter* akan melihat pertumbuhan ekonomi sebagai *outcome* program pemerintah yang dilaksanakan di daerah (Brender & Drazen, 2008; Jones et al., 2012; Levitt & Snyder, 1997). Jika pertumbuhan ekonomi baik, *expected utility* yang dirasakan *voter* akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang buruk. Penelitian empiris sebelumnya menggunakan GDP perkapita untuk mengukur kondisi perekonomian sebagai *outcome* capaian kinerja *incumbent* (Brender & Drazen, 2008; Jones et al., 2012; Levitt & Snyder, 1997).

2.7. Penyelenggaraan Infrastruktur

Mayhew (1974) dalam teorinya mengemukakan bahwa *incumbent* akan berusaha meningkatkan keterpilihannya melalui program yang dapat diambil kreditnya dengan mudah, yaitu program yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara luas. Infrastruktur merupakan salah satu program yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. *Incumbent* akan berusaha meningkatkan keterpilihannya kembali pada periode selanjutnya melalui ketersediaan infrastruktur (Aji & Dartanto, 2018). Salah satu janji kampanye SBY saat mencalonkan diri pada pilpres 2004 adalah peningkatan infrastruktur. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan barang publik di level Kab/Kota selama *incumbent* menjabat akan mempengaruhi *expected utility* dari *voter*.

Penelitian ini menggunakan infrastruktur kelistrikan untuk menangkap implementasi kinerja *incumbent* selama periode pertama pemerintahannya.

Penyelenggaraan akses listrik di pedesaan akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan lapangan pekerjaan (Dinkelman, 2011). Pada penelitian sebelumnya, terkonfirmasi adanya *political budget cycle* dalam penyelenggaraan akses listrik pada *swing voter* dan *core voter* di negara berkembang (Baskaran, Min, & Uppal, 2015). Di Indonesia, akses listrik merupakan program strategis Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya usahanya dilakukan oleh BUMN. Peneliti menggunakan infrastruktur kelistrikan sebagai variabel kontrol agar dapat mengukur kinerja *incumbent* secara langsung. Akses listrik diukur melalui jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses listrik baik oleh Pemerintah maupun swasta di Kab/Kota.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana dampak dari anggaran belanja pemerintah Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh *incumbent* selama menjabat terhadap perolehan suara *incumbent* saat mencalonkan diri kembali pada pemilihan selanjutnya. Belanja pemerintah dan perolehan suara *incumbent* pada pemilihan selanjutnya dapat ditelusuri pada level Kab/Kota. Pada tahun 2004 terdapat 440 (empat ratus empat puluh) Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengikuti Pemilihan Umum. Pada tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi 471 (empat ratus tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota karena terjadi pemekaran wilayah. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan data dari 440 (empat ratus empat puluh) Kabupaten/Kota di Indonesia. Kabupaten/Kota pemekaran tidak diikutsertakan pada observasi ini karena adanya keterbatasan data sehingga anggaran belanja pemerintah dan perolehan suara Pemilu pada Kabupaten/Kota pemekaran tidak dapat ditelusuri pada Kabupaten/Kota utama saat tahun 2004 hingga 2007.

Sumber data pada penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Database for Policy and Economic Research (DAPOER) milik World Bank Indonesia, dan Biro Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai pendekatan empiris.

3.1. Model Empiris

Penelitian ini mengadopsi model Dennis C. Mueller (2003) untuk mentransformasi kerangka konseptual menjadi model ekonometrik empiris. Tujuan *incumbent* adalah memaksimalkan *expected number of votes* dan tujuan *voter* adalah memaksimalkan *expected utility*. *Voter* akan memilih kandidat yang dapat memberikan *expected utility* lebih tinggi. Ekspektasi jumlah suara untuk *incumbent* merupakan fungsi dari *expected utility* yang dirasakan *voter*.

$$Vote_i = f(Eu_i)$$

$$Vote_i = f(Eu_i (Transfer1_i, Margin_i, Transfer1 * Margin_i, Transfer2_i, Electricity_i, GRDPcap_i, Party1_i, Party2_i))$$

Penulis melakukan estimasi model empiris untuk mengonfirmasi hasil dari analisis hubungan linier antar variabel dengan menggunakan analisis regresi data *cross-section* menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS).

$$Vote_i = \beta_0 + \beta_1.Transfer1_i + \beta_2.Margin_i + \beta_3.(Transfer1 * Margin)_i + \beta_4.Transfer2_i + \beta_5.Electricity_i + \beta_6.GRDPcap_i + \beta_7.Party1_i + \beta_8.Party2_i + e_i$$

- 1) *i* menunjukkan Kabupaten/Kota, $i = 1, 2, 3, \dots, 440$;
- 2) *Vote* adalah persentase suara *incumbent* pada Pemilihan Presiden 2009;
- 3) *Transfer1* merupakan pertumbuhan rata-rata Tugas Pembantuan per kapita pada kurun 2006-2009. Pertumbuhan rata-rata digunakan untuk dapat menangkap *marginal utility* dari voter ketika menerima anggaran belanja pemerintah;
- 4) *Margin* untuk mengukur tingkat persaingan *incumbent* di Kabupaten/Kota, didefinisikan sebagai perbedaan persentase antara jumlah suara *incumbent* dan persentase jumlah suara oposisi pada Pemilihan Presiden 2004. Definisi perolehan suara *incumbent* merupakan fungsi dari tingkat persaingan *incumbent*, berdasarkan dari studi Jones, Meloni and Tommasi (2012) dan Veiga and Veiga (2013);
- 5) *Transfer1*Margin* merupakan variabel interaksi untuk mengukur dampak alokasi Tugas Pembantuan yang berdasarkan pada jumlah suara *incumbent* di pemilihan presiden sebelumnya (tahun 2004). *Incumbent* menggunakan margin hasil pilpres 2004 yang menunjukkan tingkat persaingan yang dihadapi *incumbent* di suatu Kab/Kota sebagai dasar penetapan pola alokasi belanja pemerintah selama *incumbent* menjabat. Definisi ini berdasarkan studi dari Corvalan, Cox and Osorio (2018) dan Gonschorek, Schulze and Sjahrir (2018);
- 6) *Transfer2* adalah Ln dari belanja pemerintah dari Presiden sebelumnya (Mega) yang dialokasikan pada tahun 2005. Peneliti menggunakan variabel ini sebagai kontrol karena Mega merupakan oposisi *incumbent* pada pemilihan 2009. Penulis menggunakan pengukuran logaritma natural TP perkapita agar dapat mengontrol pertumbuhan penduduk;

7) *Electricity* adalah persentase akses rumah tangga terhadap sambungan listrik, untuk mengukur kinerja *incumbent* dalam pembangunan infrastruktur. Tidak dapat dipungkiri bahwa voter akan melihat bagaimana implementasi program-program pemerintah yang sehari-hari digunakan oleh voter untuk memenuhi kebutuhannya. Akses listrik merupakan infrastruktur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan usahanya melalui BUMN. Definisi perolehan suara *incumbent* merupakan fungsi dari penyelenggaraan barang publik berdasarkan studi dari (Aji & Dartanto, 2018);

- 8) *GRDPcap* adalah rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita daerah pada 2006-2009;
- 9) *Party1* dan *Party2* untuk mengukur dampak partai pengusung Bupati/Walikota terhadap probabilita keterpilihan *incumbent*. *Incumbent* mungkin berekspektasi jika Bupati/Walikota berasal dari partai yang sama dengan *incumbent*, maka Bupati/Walikota tersebut akan berusaha memobilisasi suara voter kepada *incumbent*. Adanya ketentuan bahwa partai calon kepala daerah memiliki minimal 15% kursi di DPRD agar dapat maju mencalonkan diri di pilkada, maka ada kemungkinan partai *incumbent* akan berkoalisi dengan partai oposisi. Peneliti menggunakan 2 (dua) dummy untuk menunjukkan kesamaan parpol kepala daerah dengan *incumbent*, yaitu (1) partai *incumbent* tanpa partai oposisi; dan (2) partai *incumbent* dengan adanya partai oposisi. Definisi probabilita *incumbent* terpilih kembali merupakan fungsi dari partai kepala daerah, berdasarkan dari studi Veiga and Veiga (2013) dan Corvalan, Cox and Osorio (2018). Variabel dummy menggunakan nilai dari *Party1* adalah 1 jika partai dari kepala daerah tidak berkoalisi dengan partai oposisi, 0 untuk kondisi selain yang telah disebutkan. Nilai dari *Party2* adalah 1 jika partai politik dari kepala daerah berkoalisi dengan partai oposisi, 0 untuk kondisi selain kondisi tersebut.

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana dampak dari anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan oleh *incumbent* selama menjabat terhadap perolehan suara *incumbent* saat mencalonkan diri kembali pada pemilihan selanjutnya.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja Tugas Pembantuan memberikan dampak positif terhadap jumlah suara *incumbent* pada pemilihan presiden berikutnya. Alokasi belanja *incumbent* yang besar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota. Voter memberikan *reward* kepada *incumbent* pada pemilihan selanjutnya karena *expected*

utility voter jika *incumbent* terpilih kembali lebih tinggi dibandingkan dengan jika *incumbent* kalah. *Voter* memiliki harapan jika *incumbent* terpilih kembali maka *voter* akan mendapatkan alokasi belanja pemerintah yang sama besarnya seperti saat periode saat *incumbent* menjabat sebelumnya sehingga penyelenggaraan infrastruktur akan semakin meningkat.

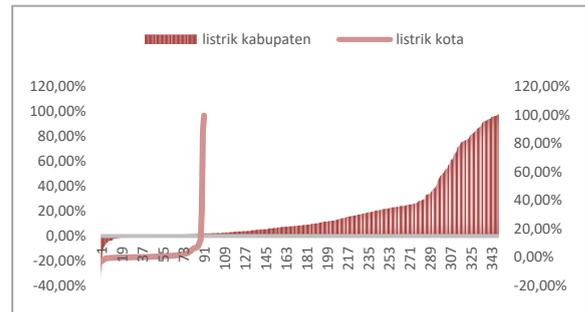
Tingkat kompetisi *incumbent* pada suatu Kabupaten/Kota memiliki dampak positif terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan selanjutnya. Semakin tinggi selisih suara yang diperoleh *incumbent*, maka daerah tersebut merupakan *core voter*, basis *incumbent*. Dengan mayoritas Kab/Kota merupakan basis *incumbent*, maka peluang *incumbent* besar untuk terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya.

Variabel moderasi anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan berdasarkan tingkat kompetisi *incumbent* memperkuat dampak anggaran Tugas Pembantuan terhadap perolehan suara *incumbent*. Namun, semakin tinggi tingkat kompetisi, maka dampak alokasi anggaran Tugas Pembantuan akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak peningkatan alokasi anggaran Tugas Pembantuan akan efektif jika diberikan kepada *swing voter* namun akan semakin menurun jika diberikan pada *core voter*. Karena, dengan jumlah alokasi anggaran yang minimal pun *core voter* akan tetap berpihak pada *incumbent*.

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh Presiden sebelumnya tidak mempengaruhi perolehan suara *incumbent*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa *voters* tidak menggunakan anggaran belanja Presiden sebelumnya untuk menilai kinerja *incumbent*.

Pertumbuhan akses listrik memberikan dampak negatif terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan selanjutnya. Jika dilihat lebih lanjut, mayoritas akses listrik di kota telah tersedia sejak sebelum tahun 2004. Selama *incumbent* menjabat, pertumbuhan akses listrik di Kabupaten lebih tinggi dibandingkan dengan Kota. Di Indonesia, penyelenggaraan infrastruktur pada daerah terpencil merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa rendahnya penyelenggaraan akses listrik oleh *incumbent* karena untuk menjangkau daerah terpencil Pemerintah Pusat harus mengeluarkan biaya investasi yang tinggi. *Voter* tidak merasakan peningkatan *utility* berdasarkan penyelenggaraan akses listrik selama *incumbent* menjabat sehingga probabilita *incumbent* terpilih kembali menjadi turun.

GRAFIK 2. PENYELENGGARAAN AKSES LISTRIK DI KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2004-2008



Sumber : INDODAPOER World Bank, diolah kembali oleh penulis

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap perolehan suara *incumbent* pada Pemilihan Presiden berikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa *voter* akan melihat pertumbuhan ekonomi di daerahnya sepanjang *incumbent* menjabat. Program pemerintah pusat yang ditetapkan *incumbent* di daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah sepanjang *incumbent* menjabat yang terus meningkat akan meningkatkan *utility voter*. *Voter* akan memberikan *reward* pada *incumbent* di pemilihan selanjutnya karena *expected utility voter* jika *incumbent* terpilih kembali lebih tinggi dibandingkan jika *incumbent* kalah. *Voter* memiliki harapan jika *incumbent* terpilih kembali maka pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota pada periode selanjutnya akan semakin meningkat.

Bupati/Walikota yang berasal dari partai yang sama dengan *incumbent* dan tidak ada koalisi dengan partai oposisi tidak memiliki dampak apapun terhadap perolehan suara *incumbent* di pemilihan periode selanjutnya. Selanjutnya, Bupati/Walikota yang berasal dari partai yang sama dengan *incumbent* dan ada koalisi dengan partai oposisi tidak memiliki dampak apapun terhadap perolehan suara *incumbent* di pemilihan periode selanjutnya. Pada tahun 2005 Indonesia baru memulai menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sepanjang tahun 2005-2009, sebanyak 79% (tujuh puluh sembilan persen) Kab/Kota yang menerapkan pilkada secara langsung. Sebanyak 47% (empat puluh tujuh persen) Kab/Kota yang menerapkan pilkada langsung tersebut masih dominan dikuasai oleh 2 (dua) partai oposisi besar, yaitu Golkar dan PDIP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berusaha menganalisis dampak anggaran belanja pemerintah Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh *incumbent* selama menjabat tahun 2006 hingga tahun 2009 terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan tahun 2009. Menggunakan 440 (empat ratus empat puluh) Kabupaten/Kota sebagai

obyek observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa *incumbent* menggunakan anggaran belanja pemerintah untuk meningkatkan probabilitas terpilih kembali pada periode berikutnya. Anggaran Tugas Pembantuan yang alokasinya berdasarkan tingkat persaingan yang dihadapi *incumbent*, memiliki dampak yang kuat terhadap probabilita *incumbent* terpilih kembali. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya mengenai anggara belanja pemerintah dan keterpilihan kembali di negara berkembang. Meskipun, dengan alokasi belanja pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan keterpilihan *incumbent*, namun penyelenggaraan barang publik dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota menjaga perilaku *incumbent* untuk tetap meningkatkan kualitas kinerjanya agar dapat terpilih kembali. Hal ini merupakan indikasi bahwa *voter* telah memiliki pemahaman yang baik mengenai kinerja *incumbent*.

6. KETERBATASAN DAN KONTRIBUSI

6.1. Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian ini terbatas pada hubungan dampak alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan periode selanjutnya;
- b. Penelitian ini menggunakan data *cross section* 1 (satu) periode pemilihan, yaitu tahun 2009 karena data alokasi anggaran TP yang tersedia adalah tahun 2005-2009. Data alokasi anggaran TP tahun 2001 hingga 2004 tidak terdokumentasikan oleh instansi terkait sehingga penulis tidak dapat melakukan penelitian pengaruh alokasi belanja TP tahun 2001-2004 terhadap pilpres tahun 2004;
- c. Data belanja pemerintah berupa Tugas Pembantuan (TP) yang digunakan adalah alokasi anggaran TP Kab/Kota tahun 2005 hingga 2009 karena data realisasi belanja TP untuk tahun 2005 hingga 2008 tidak terdokumentasikan oleh instansi terkait;
- d. Penelitian ini tidak melihat pengaruh budaya masyarakat Indonesia terhadap perilaku *voting*.

6.2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap hasil studi terdahulu, yaitu :

- a. Menambah hasil penelitian mengenai efektivitas belanja Pemerintah terhadap probabilita *incumbent* terpilih kembali pada negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar dan *incumbent* merupakan *risk lover*;
- b. Penelitian ini berusaha menggunakan variabel interaksi antara alokasi anggaran belanja pada

saat *incumbent* menjabat dengan tingkat selisih suara *incumbent* dengan *challenger* pada pemilihan sebelumnya;

- c. Penelitian ini berusaha menggunakan variabel progres penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat di level Kab/Kota sebagai variabel kontrol capaian kinerja *incumbent* pada periode pertama pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Aji, N., & Dartanto, T. (2018). Behind the Jokowi's victory: did economic voting matter in the 2014 Indonesian presidential election? *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 2(1), 115–138. <https://doi.org/10.1007/s41685-018-0083-3>
- Baskaran, T., Min, B., & Uppal, Y. (2015). Election cycles and electricity provision : Evidence from a quasi-experiment with Indian special elections. *Journal of Public Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.03.011>
- Brender, A., & Drazen, A. (2008). How Do Budget Deficits and Economic Growth Affect Reelection Prospects ? Evidence from a Large Panel of Countries A. *American Economic Association*, 98(5), 2203–2220.
- Corvalan, A., Cox, P., & Osorio, R. (2018). Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities. *Journal of Development Economics*, 133(January), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.001>
- Cox, G. W., & Mccubbins, M. D. (1986). Electoral Politics as a Redistributive Game. *The Journal of Politics*, 48(2), 370–389.
- Dennis C. Mueller. (2003). *public choice* 3.
- Dinkelman, T., 2011. The effects of rural electrification on employment: new evidence from South Africa. *Am. Econ. Rev.* 101 (7).
- Dixit, A., & Londregan, J. (1995). Redistributive Politics and Economic Efficiency Author (s): Avinash Dixit and John Londregan Source : The American Political Science Review , Vol . 89 , No . 4 (Dec . , 1995) , pp . 856-866 Published by : American Political Science Association Stable UR. *The American Political Science Review*, 89(4), 856–866.
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal of Political Economy*, 65(2), 135–150.
- Feldman, P., & Jondrow, J. (1984). Congressional Elections and Local Federal. *American Journal of Political Science*, 28(1), 147–164.
- Gonschorek, G. J., Schulze, G. G., & Sjahrir, B. S. (2018). To the ones in need or the ones you need? The political economy of central discretionary grants – empirical evidence from Indonesia. *European Journal of Political Economy*, (March), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.04.003>
- Jones, M. P., Meloni, O., & Tommasi, M. (2012). Voters

- as Fiscal Liberals: Incentives and Accountability in Federal Systems. *Economics and Politics*, 24(2), 135–156. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2012.00395.x>
- Kriner, D. L., & Reeves, A. (2012). The influence of federal spending on presidential elections. *American Political Science Review*, 106(2), 348–366. <https://doi.org/10.1017/S0003055412000159>
- Levitt, S. D., & Snyder, J. M. (1997). The Impact of Federal Spending on House Election Outcomes. *Journal of Political Economy*, 105(1), 30–53.
- Mayhew, D. R. (1974). *Congress : The Electoral Connection.pdf*. New Haven: Yale University Press.
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.02>
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazanero, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, Voters and Clientism. *Cambridge University Press*, 3–27.
- Szwarcberg, M. (2012). Uncertainty , Political Clientelism , and Voter Turnout in Latin America : Why Parties Conduct Rallies in Argentina. *Comparative Politics*, 45(1), 88–106.
- Tufte, E. R. (1979). Political Control of the Economy. In *Political Control of the Economy* (pp. 3–13).
- Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2013). Intergovernmental fiscal transfers as pork barrel. *Public Choice*, 155(3–4), 335–353. <https://doi.org/10.1007/s11127-011-9863-2>
- Weibull, A., & Lindbeck, J. W. (1987). Balanced-Budget Redistribution as the Outcome of Political Competition. *Public Choice*, 52(3), 273–297.

LAMPIRAN TABEL

TABEL 3. STATISTIKA DESKRIPTIF

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
Vote	440	59.19956	16.894	8.372395	97.75665
Transfer1	440	127.099	704.8357	-59.23743	14161.73
Margin	440	22.90894	33.31012	-62.97594	96.86821
Transfer1 * Margin	440	3409.257	24480.6	-11162.58	496590.3
Transfer2	440	5.666622	4.7975	0	13.691
Electricity	440	16.22968	25.67648	-32.18	99.53
GRDPcap	440	15.524	0.7180	13.575	19.103
Party1	440	0.0431818	0.2034976	0	1
Party2	440	0.0454545	0.208536	0	1

Sumber : output STATA, hasil pengolahan penulis

VARIABLES	(1) Model 1	(2) Model 2	(3) Model 3	(4) Model 4	(5) Model 5	(6) Model 6	(7) Model 7	(8) Model 8
Transfer1	0.00195*** (0.000503)	0.00182*** (0.000491)	0.0174** (0.00736)	0.0177** (0.00742)	0.0168** (0.00753)	0.0164** (0.00760)	0.0164** (0.00761)	0.0163** (0.00766)
Margin		0.122*** (0.0312)	0.157*** (0.0325)	0.157*** (0.0326)	0.154*** (0.0326)	0.150*** (0.0329)	0.150*** (0.0331)	0.150*** (0.0332)
Transfer1*Margin			-0.000457** (0.000212)	-0.000464** (0.000214)	-0.000441** (0.000217)	-0.000433** (0.000219)	-0.000433** (0.000220)	-0.000425* (0.000222)
Transfer2				0.0664 (0.166)	-0.0240 (0.164)	-0.0116 (0.163)	-0.0114 (0.163)	-0.00794 (0.163)
Electricity					-0.0845*** (0.0285)	-0.0853*** (0.0282)	-0.0853*** (0.0282)	-0.0847*** (0.0282)
GRDPcap						0.307* (0.180)	0.308* (0.181)	0.310* (0.180)
Party1							-0.377 (2.799)	-0.437 (2.803)
Party2								-1.552 (3.384)
Constant	58.95*** (0.813)	56.17*** (0.771)	54.94*** (0.920)	54.56*** (1.323)	56.57*** (1.382)	55.16*** (1.643)	55.18*** (1.651)	55.21*** (1.656)
Observations	440	440	440	440	440	440	440	440
Adjusted R-sq	0.004	0.060	0.067	0.065	0.079	0.083	0.081	0.080

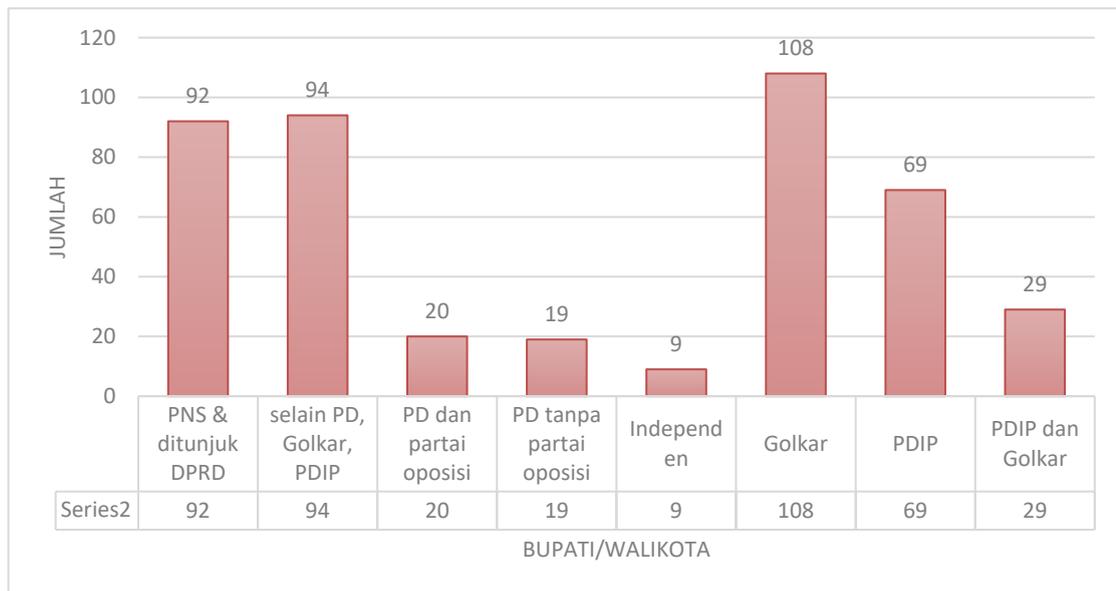
TABEL 4. HASIL ESTIMASI PERSAMAAN EMPIRIS

Robust standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber : output STATA, hasil pengolahan penulis

LAMPIRAN GRAFIK

GRAFIK 3. PARPOL PENDUKUNG BUPATI/WALIKOTA



Sumber : KPU, diolah oleh penulis